



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Februari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
UNIT KERJA : RSUD KABUPATEN KARANGANYAR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : WAHYU WIBOWO
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN ANGGARAN
3. NHK : 888123

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 925.000.000

1. Tanah Seluas 1992 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR,
WARISAN Rp. 121.000.000
2. Tanah Seluas 1764 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR,
WARISAN Rp. 54.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 1484 m2/192 m2 di KAB / KOTA
KARANGANYAR, WARISAN Rp. 750.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 155.000.000

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
4.500.000
2. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA Tahun 2010, HASIL SENDIRI
Rp. 125.000.000
3. MOTOR, HONDA ASTREA/C100 Tahun 1990, HASIL SENDIRI Rp.
3.500.000
4. MOTOR, YAMAHA RX-KING Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp.
22.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 22.300.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 17.740.891

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.120.040.891

III. HUTANG Rp. 386.105.263

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 733.935.628



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.